



BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah	Rp. 1.542.544.353.846,00
(2) Belanja Daerah	<u>Rp. 1.508.750.795.274,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 33.793.558.572,00
(3) Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 33.793.558.572,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. (33.793.558.572,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.542.544.353.846,00 yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah	Rp.	166.760.000.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	4.822.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	Rp.	7.214.161.550,00
d. Lain-Lain PAD yang sah	Rp.	<u>79.210.485.523,00</u>
	Rp.	258.006.647.073,00

- (2) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan

Ketentuan Perundang- Undangan Rp. 0,00

Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.542.544.353.846,00

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan:

a. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat Rp. 1.232.174.701.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Rp. 52.363.005.773,00

Daerah Rp. 1.284.537.706.773,00

Pasal 6

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.508.750.795.274,00, yang terdiri atas :

- a. belanja operasi
- b. belanja modal
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer

Pasal 7

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan Rp. 1.170.893.150.968,00 terdiri atas :

a. Belanja Pegawai	Rp.	731.438.531.936,88
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	434.160.394.692,12
c. Belanja Bunga	Rp.	1.326.232.839,00
d. Belanja Hibah	Rp.	3.967.991.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00

Pasal 8

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan Rp. 60.387.427.606,00 terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah	Rp.	6.500.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	10.860.901.190,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	9.991.267.016,00
d. Belanja Modal Jalan,		

Jaringan, dan Irigasi	Rp.	32.760.359.400,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	74.900.000,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	200.000.000,00

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan Rp.4.000.000.000,00

Pasal 10

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebagai berikut :

a. Belanja Bagi Hasil	Rp.	17.108.200.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	<u>256.362.016.700,00</u>
	Rp.	273.470.216.700,00

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 33.793.558.572,00 yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. penerimaan pengeluaran.

Pasal 12

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 0.

Pasal 13

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp 33.793.558.572,00.

1. Penjabaran Lampiran 1 APBD Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Penjabaran Lampiran 2 APBD Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Penjabaran Lampiran 3a APBD Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Penjabaran Lampiran 3b APBD Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
5. Penjabaran Lampiran 4a APBD Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Penjabaran Lampiran 4b APBD Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Penjabaran Daftar Nama Penerima, Alamat Dan

- | | | |
|-----|--------------------------------|---|
| | Lampiran 5a APBD | Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; |
| 8. | Penjabaran
Lampiran 5b APBD | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; |
| 9. | Penjabaran
Lampiran 6a APBD | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; |
| 10. | Penjabaran
Lampiran 6b APBD | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota; |
| 11. | Penjabaran
Lampiran 6c APBD | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa |
| 12. | Penjabaran
Lampiran 7 APBD | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 13. | Penjabaran
Lampiran 9 APBD | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |

Pasal 14

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Bupati Serdang Bedagai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI SERDANG BEDAGAI,




DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,




SUWANTO NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025
NOMOR 68



KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	258.006.647.073,00
4.1.01	Pajak Daerah	166.760.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.000.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.000.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.000.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	8.500.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	8.500.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	8.500.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	850.000.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	850.000.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	850.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	54.218.950.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	54.218.950.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	54.218.950.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.567.350.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.567.350.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.567.350.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	43.583.700.000,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	5.526.900.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	5.526.900.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	36.192.000.000,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	36.192.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	405.000.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	405.000.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	459.800.000,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	459.800.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.000.000.000,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	1.000.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	22.000.000.000,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	22.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	22.000.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	22.000.000.000,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	22.000.000.000,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	22.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.822.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.320.000.000,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	900.000.000,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	900.000.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	420.000.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	420.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.378.000.000,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	298.000.000,00
4.1.02.02.001.00003	Retribusi Penyewaan Bangunan	6.000.000,00
4.1.02.02.001.00006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	72.000.000,00
4.1.02.02.001.00007	Retribusi Pemakaian Alat	220.000.000,00
4.1.02.02.002	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.050.000.000,00
4.1.02.02.002.00002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.050.000.000,00
4.1.02.02.011	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00
4.1.02.02.011.00003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	30.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.124.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.088.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.088.000.000,00
4.1.02.03.008	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	36.000.000,00
4.1.02.03.008.00001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	36.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.214.161.550,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.214.161.550,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.214.161.550,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.214.161.550,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	79.210.485.523,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00
4.1.04.01.002	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	200.000.000,00
4.1.04.01.002.00054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	200.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	144.000.000,00
4.1.04.03.002	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	144.000.000,00
4.1.04.03.002.00001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	144.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.05	Jasa Giro	618.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	618.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	618.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.088.000.000,00
4.1.04.07.001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.088.000.000,00
4.1.04.07.001.00001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.088.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	400.000.000,00
4.1.04.08.001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	400.000.000,00
4.1.04.08.001.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	400.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	100.000.000,00
4.1.04.09.001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	100.000.000,00
4.1.04.09.001.00001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	100.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.216.778.200,00
4.1.04.11.001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.216.778.200,00
4.1.04.11.001.00001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.216.778.200,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	752.505.074,00
4.1.04.15.004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	100.000.000,00
4.1.04.15.004.00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000,00
4.1.04.15.008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	652.505.074,00
4.1.04.15.008.00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	652.505.074,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	73.691.202.249,00
4.1.04.16.002	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	73.691.202.249,00
4.1.04.16.002.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	73.691.202.249,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.284.537.706.773,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.232.174.701.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	178.896.649.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	178.896.649.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	178.896.649.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	20.802.962.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	15.536.482.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	10.963.606.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	4.572.876.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	2.631.000.000,00
4.2.01.07.002.00002	DBH SDA Gas Bumi	1.864.000,00
4.2.01.07.002.00003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	54.394.000,00
4.2.01.07.002.00005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	2.139.607.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	88.329.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	346.806.000,00
4.2.01.07.003	DBH Lainnya	2.635.480.000,00
4.2.01.07.003.00001	DBH Sawit	2.635.480.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	756.486.195.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	729.367.302.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	729.367.302.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	27.118.893.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.200.000.000,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	6.823.489.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	19.095.404.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	275.988.895.000,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	26.580.373.000,00
4.2.01.09.001.00034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	25.408.543.000,00
4.2.01.09.001.00060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1.171.830.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	249.408.522.000,00
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	80.858.100.000,00
4.2.01.09.002.00003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.362.500.000,00
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	123.834.069.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	144.000.000,00
4.2.01.09.002.00021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.017.305.000,00
4.2.01.09.002.00028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	5.124.000.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	7.207.200.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.984.848.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.159.000.000,00
4.2.01.09.002.00041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.363.005.773,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	52.363.005.773,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52.363.005.773,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.274.291.938,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	496.158.707,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.592.555.128,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.3.03.02.001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00
4.3.03.02.001.00001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.542.544.353.846,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.170.893.150.968,00
5.1.01	Belanja Pegawai	731.438.531.936,88
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	501.817.077.786,88
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	377.779.034.983,31
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	239.476.869.454,84
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	138.302.165.528,47
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	35.549.293.233,90
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	23.122.750.840,40
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.426.542.393,50
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.082.877.408,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.080.209.708,00
5.1.01.01.003.00002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	2.667.700,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.667.405.432,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.348.109.732,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.319.295.700,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.709.050.679,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.288.184.179,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.420.866.500,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	21.132.805.805,60
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.256.649.328,60
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.876.156.477,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	789.622.121,14
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	788.582.894,14
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.039.227,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.189.499,60
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.062.276,66
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	26.127.222,94
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.391.667.672,87
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.897.170.781,26
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.494.496.891,61
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	924.205.592,76
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	585.680.413,34
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	338.525.179,42

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.761.925.358,70
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.750.267.625,54
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.011.657.733,16
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	204.991.796.937,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	76.835.437.547,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	76.835.437.547,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	128.156.359.390,00
5.1.01.02.006.00006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	53.606.803,00
5.1.01.02.006.00007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	234.893.250,00
5.1.01.02.006.00008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	14.875.000,00
5.1.01.02.006.00009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	85.000.000,00
5.1.01.02.006.00011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	6.839.525,00
5.1.01.02.006.00012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	270.937.500,00
5.1.01.02.006.00013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	1.700.000,00
5.1.01.02.006.00015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.615.729.031,00
5.1.01.02.006.00016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	532.459.281,00
5.1.01.02.006.00020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	935.000.000,00
5.1.01.02.006.00021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	427.250.000,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	123.834.069.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	144.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.132.839.674,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	105.369.600,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	105.369.600,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	136.873.800,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	136.873.800,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.860.900,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.860.900,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	4.567.500,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	4.567.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	574.294,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	574.294,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.742.611.080,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	87.949.512,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.646.400.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.337.600.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.337.600.000,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	644.817.539,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	69.316.997,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	69.316.997,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.874.500,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.874.500,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	107.932.500,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	107.932.500,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.567.287,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.567.287,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	715.829,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	715.829,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.230,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.230,00
5.1.01.05.007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.870.780,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.870.780,00
5.1.01.05.008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	143.910,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	143.910,00
5.1.01.05.009	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	431.730,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	431.730,00
5.1.01.05.010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	449.962.776,00
5.1.01.05.010.00007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	27.634.500,00
5.1.01.05.010.00008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.010.00009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	10.000.000,00
5.1.01.05.010.00011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	804.650,00
5.1.01.05.010.00012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	31.875.000,00
5.1.01.05.010.00013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	200.000,00
5.1.01.05.010.00015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	178.321.063,00
5.1.01.05.010.00016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	50.877.563,00
5.1.01.05.010.00020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	110.000.000,00
5.1.01.05.010.00021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	38.500.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	0,00
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.160.394.692,12
5.1.02.01	Belanja Barang	73.679.569.327,12
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	73.231.662.027,12
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	494.932.525,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	117.006.000,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.348.573.816,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	738.320.500,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	116.797.000,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.590.865.000,00
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	60.800.000,00
5.1.02.01.001.00014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	103.801.111,12
5.1.02.01.001.00019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	7.434.000,00
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	237.600.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.706.032.421,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.133.096.468,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	140.625.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	560.635.000,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.182.064.014,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	451.163.575,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	106.853.625,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	120.222.000,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.963.172,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.388.819.900,00
5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.672.800.000,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.566.095.900,00
5.1.02.01.001.00045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.882.412.000,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.745.888.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	138.831.000,00
5.1.02.01.001.00060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	279.000.000,00
5.1.02.01.001.00062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	21.600.000,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	25.200.000,00
5.1.02.01.001.00065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	125.550.000,00
5.1.02.01.001.00066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	35.460.000,00
5.1.02.01.001.00067	Belanja Pakaian Penyelamatan	14.400.000,00
5.1.02.01.001.00074	Belanja Pakaian Adat Daerah	21.600.000,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	80.220.000,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	447.907.300,00
5.1.02.01.004.00109	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	1.000.000,00
5.1.02.01.004.00117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	91.850.300,00
5.1.02.01.004.00120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.457.000,00
5.1.02.01.004.00124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	32.600.000,00
5.1.02.01.004.00558	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	120.000.000,00
5.1.02.01.004.00571	Belanja Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	143.874.657.890,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	76.433.098.644,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.171.290.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	843.800.000,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	13.600.000,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.600.000,00
5.1.02.02.001.00010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	4.000.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	5.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	363.600.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	116.000.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	270.000.000,00
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	60.000.000,00
5.1.02.02.001.00018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.500.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.987.255.400,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.362.852.000,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.368.667.792,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.478.388.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	156.400.000,00
5.1.02.02.001.00042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	50.000.000,00
5.1.02.02.001.00046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	50.000.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	40.000.000,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	74.000.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	33.660.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	66.240.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	24.552.911.953,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	85.961.500,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.607.200.000,00
5.1.02.02.001.00066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	31.500.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	519.099.999,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	188.892.000,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.981.520.000,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	389.260.000,00
5.1.02.02.001.00082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	4.500.000,00
5.1.02.02.001.00083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	1.489.200.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	2.203.200.000,00
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	18.849.600.000,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	50.896.003.200,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	49.442.400.000,00
5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	1.453.603.200,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.632.480.000,00
5.1.02.02.004.00034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	29.850.000,00
5.1.02.02.004.00035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.712.000.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	144.000.000,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	171.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.350.130.000,00
5.1.02.02.004.00124	Belanja Sewa Alat Pemadam Kebakaran	25.000.000,00
5.1.02.02.004.00132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	200.000.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	802.000.000,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00
5.1.02.02.005.00002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	236.000.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	112.000.000,00
5.1.02.02.005.00030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.000.000,00
5.1.02.02.005.00036	Belanja Sewa Taman	96.000.000,00
5.1.02.02.005.00050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	300.000.000,00
5.1.02.02.006	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.000.000,00
5.1.02.02.006.00103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.178.968.023,00
5.1.02.02.008.00002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.133.320.569,00
5.1.02.02.008.00009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	70.000.000,00
5.1.02.02.008.00018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	975.647.454,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	565.000.000,00
5.1.02.02.009.00011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	565.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.127.893.000,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	478.993.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	1.648.900.000,00
5.1.02.02.013	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	234.215.023,00
5.1.02.02.013.00002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.301.400,00
5.1.02.02.013.00003	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.000.000,00
5.1.02.02.013.00007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	13.857.480,00
5.1.02.02.013.00008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	885.318,00
5.1.02.02.013.00009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	5.029.452,00
5.1.02.02.013.00011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	422.625,00
5.1.02.02.013.00012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	16.250.052,00
5.1.02.02.013.00013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	105.840,00
5.1.02.02.013.00015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	90.415.872,00
5.1.02.02.013.00016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	25.937.652,00
5.1.02.02.013.00020	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	55.009.332,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	17.105.390.337,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.001	Belanja Pemeliharaan Tanah	95.515.000,00
5.1.02.03.001.00029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	95.515.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.966.202.000,00
5.1.02.03.002.00012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	210.000.000,00
5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	158.190.000,00
5.1.02.03.002.00034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.697.573.000,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	493.620.000,00
5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	559.650.000,00
5.1.02.03.002.00040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	60.000.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00
5.1.02.03.002.00120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	24.449.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	370.270.000,00
5.1.02.03.002.00123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.000.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	183.230.000,00
5.1.02.03.002.00406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.220.000,00
5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	153.000.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.097.808.846,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.957.808.846,00
5.1.02.03.003.00010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.140.000.000,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	938.864.491,00
5.1.02.03.004.00003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	450.000.000,00
5.1.02.03.004.00013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00
5.1.02.03.004.00026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	380.864.491,00
5.1.02.03.004.00126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	108.000.000,00
5.1.02.03.006	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	7.000.000,00
5.1.02.03.006.00002	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	7.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	34.080.033.619,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.580.033.619,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.205.034.119,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.374.999.500,00
5.1.02.04.002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	500.000.000,00
5.1.02.04.002.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.690.800.004,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.396.800.004,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	464.800.004,00
5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	932.000.000,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	294.000.000,00
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	294.000.000,00
5.1.02.05.002.00002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	94.769.300.000,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	82.220.600.000,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	80.858.100.000,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.362.500.000,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	5.206.500.000,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	5.124.000.000,00
5.1.02.89.002.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
5.1.02.89.003	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	7.342.200.000,00
5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	7.207.200.000,00
5.1.02.89.003.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.960.643.515,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.960.643.515,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.960.643.515,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.326.232.839,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	1.326.232.839,00
5.1.03.04.001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	1.326.232.839,00
5.1.03.04.001.00001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	1.326.232.839,00
5.1.05	Belanja Hibah	3.967.991.500,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.967.991.500,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.897.991.500,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.897.991.500,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	70.000.000,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	70.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	60.387.427.606,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.500.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	6.500.000.000,00
5.2.01.01.001	Belanja Modal Tanah Persil	6.500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.01.01.001.00007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	6.500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.860.901.190,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.850.000.000,00
5.2.02.01.001	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.850.000.000,00
5.2.02.01.001.00003	Belanja Modal Excavator	1.850.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	850.000.000,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	850.000.000,00
5.2.02.02.001.00002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	850.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.691.668.000,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	1.320.027.000,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.320.027.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	371.641.000,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	233.580.000,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	84.061.000,00
5.2.02.05.002.00007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	54.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	423.800,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	423.800,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	423.800,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	100.050.000,00
5.2.02.07.001	Belanja Modal Alat Kedokteran	100.050.000,00
5.2.02.07.001.00029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	100.050.000,00
5.2.02.07.002	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00
5.2.02.07.002.00005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	413.978.000,00
5.2.02.08.007	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	388.970.000,00
5.2.02.08.007.00006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	388.970.000,00
5.2.02.08.008	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	25.008.000,00
5.2.02.08.008.00015	Belanja Modal Photo and Film Equipment	25.008.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.424.222.656,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	541.862.656,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	481.922.656,00
5.2.02.10.001.00003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	59.940.000,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	882.360.000,00
5.2.02.10.002.00005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	882.360.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.530.558.734,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.530.558.734,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.530.558.734,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.991.267.016,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	9.791.267.016,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.791.267.016,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.644.472.827,00
5.2.03.01.001.00030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	146.794.189,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.760.359.400,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	32.760.359.400,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	30.960.359.400,00
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	3.760.882.000,00
5.2.04.01.001.00004	Belanja Modal Jalan Kota	24.616.176.400,00
5.2.04.01.001.00010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.583.301.000,00
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	1.800.000.000,00
5.2.04.01.002.00003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.800.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00
5.2.04.02.001.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0,00
5.2.04.02.001.00005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	0,00
5.2.04.02.007	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00
5.2.04.02.007.00001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	74.900.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	74.900.000,00
5.2.05.01.001	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	74.900.000,00
5.2.05.01.001.00001	Belanja Modal Buku Umum	74.900.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00
5.2.06.01.001	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00
5.2.06.01.001.00005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	200.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	273.470.216.700,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	17.108.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	17.108.200.000,00
5.4.01.01.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	17.108.200.000,00
5.4.01.01.003.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	17.108.200.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	256.362.016.700,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	256.362.016.700,00
5.4.02.05.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	77.465.367.700,00
5.4.02.05.001.00003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	77.465.367.700,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	178.896.649.000,00
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	178.896.649.000,00
	Jumlah Belanja	1.508.750.795.274,00
	Total Surplus/(Defisit)	33.793.558.572,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33.793.558.572,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.793.558.572,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	33.793.558.572,00
6.2.03.04.003	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	33.793.558.572,00
6.2.03.04.003.00001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	33.793.558.572,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	33.793.558.572,00
	Pembiayaan Netto	-33.793.558.572,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



Bupati Serdang Bedagai,

(Signature)
Dama Wijaya